



LAPORAN EITI 2012-2013

**Rapat Tim Pelaksana
3 Nopember 2015**

Agenda

Plan vs Actual

Laporan Kontekstual:

- Matrix (Highlight) Pemenuhan Standar EITI
- Data-data Yang Tidak Tersedia di Publik
- Data-data Yang Tidak Disediakan Tim Pelaksana
- Rekomendasi

Laporan Rekonsiliasi:

- Matrix (Highlight) Pemenuhan Standar EITI
- Hasil Rekonsiliasi
- Coverage Data Yang Direkonsiliasi
- Temuan dan Rekomendasi

Plan vs Actual

No.	Instansi Pemerintah	Minggu ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		Bulan	MEI	JUNI					JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER				NOV
		Minggu ke	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
P1	Kick-off & Planning	Plan																										
		Actual																										
	Inception Report	Plan																										
		Actual																										
	Observation & Recommendation	Plan																										
		Actual																										
	Draft of Reporting Template	Plan																										
		Actual																										
	List of Analysis and Mitigation Plan	Plan																										
		Actual																										
	List of PIC	Plan																										
		Actual																										
P2	Submission of Reporting Template	Plan																										
		Actual																										
	List of Control Status	Plan																										
		Actual																										
	Workshop	Plan																										
		Actual				Minerba			Migas																			
	Progress Meeting	Plan																										
		Actual																										
	Procedures and Approach	Plan																										
		Actual																										
	Preparation of Contextual Report	Plan																										
		Actual			Collecting & Analysis Macro Data																							
P3	Reconciliation Process	Plan																										
		Actual																										
P4	Investigation of Discrepancies	Plan																										
		Actual																										
P5	Submission Draft Report to Secretariat	Plan																										
		Actual																										
	Submission Draft Report to MSG	Plan																										
		Actual																										
	Final Contextual Report	Plan																										
		Actual																										
	Observation & Recommendation	Plan																										
		Actual																										
	Review on the Report	Plan																										
		Actual																										
	Final MSG Approval	Plan																										
		Actual																										

Deliverables

- **Buku 1 - Ringkasan Eksekutif**
- **Buku 2 - Laporan Kontekstual**
- **Buku 3 - Laporan Rekonsiliasi**
- **Buku 4 - Lampiran Laporan Rekonsiliasi**

MATRIX

PEMENUHAN STANDAR EITI

Matrix Daftar Isi dan Standar EITI

DAFTAR ISI	STANDAR EITI
RINGKASAN EKSEKUTIF 1 LATAR BELAKANG 1.1 Gambaran Umum EITI 1.2 Implementasi EITI di Indonesia 1.3 Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi Publik dalam Hubungannya dengan Pelaksanaan EITI di Indonesia	
2 TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF 2.1 Kerangka Hukum Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), Mineral dan Batubara (Minerba) 2.2 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif 2.3 Sistem Kontrak dan Perizinan Industri Ekstraktif 2.4 Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola yang Sedang Berjalan	3.2 The EITI Report must describe the legal framework and fiscal regime governing the extractive industries. 3.2.a This information must include a summary description of the fiscal regime, ... 3.2.b Documentation of government reforms

Matrix Daftar Isi dan Standar EITI

DAFTAR ISI	STANDAR EITI
3 PROSES ALOKASI DAN TENDER WILAYAH KERJA MIGAS DAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERBA 3.1 Proses Penetapan dan Tender Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 3.2 Proses Penetapan dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan Minerba 3.3 Deviasi dari UU dan Peraturan yang Mengatur Proses Lisensing 3.4 Pengungkapan Kontrak (<i>Contract Disclosure</i>) 3.5 Informasi Kadaster (<i>Cadastre Information</i>) 3.6 Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>)	3.9 Information on the licencing process and register 3.9.a definition of licence 3.9.b Implementing countries are required to maintain a publicly available register or cadastre system: i. license holder(s); ii. coordinates of the license area; iii. date of application, date of award and duration of the license; and iv. in the case of production licenses, the commodity being produced. 3.9.c if publicly available include reference link. If not it should disclose any gaps in the publicly available information and document efforts to strengthen these systems. In the interim, the EITI Report itself should include the information set out in 3.9(b) above. 3.10 Allocation of licenses 3.10.a disclose information related to the award or transfer of licenses 3.10.b disclose the list of applicants and the bid criteria 3.10.c a reference or link of disclosure 3.11 Beneficial Owner 3.11.a register of the beneficial owners 3.12 Contract 3.12.b documents the government's policy on disclosure of contracts and licenses that govern the exploration and exploitation of oil, gas and minerals.

Matrix Daftar Isi dan Standar EITI

DAFTAR ISI	STANDAR EITI
4 MANAJEMEN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF 4.1 Penerimaan Negara dan Kebijakan Fiskal yang Berasal Dari Industri Ekstraktif 4.2 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit 4.3 Pandangan Umum Industri Ekstraktif 4.4 Alokasi Penerimaan Pemerintah Pusat yang Berasal dari Industri Ekstraktif kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bagi Hasil - Dana Bagi Hasil (DBH)	3.7 Distribution of revenues from the extractive industries 3.7.a identify extractive industry revenues, whether cash or in-kind, are recorded in the national budget. 3.7.b reference national revenue classification systems, and international standards 3.8 Further information on revenue management and expenditures in the EITI Report 3.8.a extractive revenues earmarked for specific programmes or geographic regions. 3.8.b A description of the country's budget and audit processes 3.8.c assumptions of forthcoming years relating to projected production, commodity prices and revenue forecasts arising from the extractive industries and the proportion of future fiscal revenues
5 TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 5.1 Pertambangan Migas: <i>Abandonment and Site Restoration Fund</i> (ASR Fund) 5.2 Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang 5.3 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	

Matrix Daftar Isi dan Standar EITI

DAFTAR ISI	STANDAR EITI
6 PENGELOLAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA 6.1 Industri Ekstraktif di Indonesia dalam Konteks Global 6.2 Industri Minyak dan Gas Bumi 6.3 Industri Pertambangan Mineral dan Batubara 6.4 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Perekonomian Indonesia 6.5 Kegiatan Informal dalam Industri Ekstraktif	3.3 Overview of extractive industries including any significant exploration activities. 3.4 the contribution of the extractive industries to the economy 3.4.a to GDP including an estimate of informal sector activity. 3.4.b Total government revenues 3.4.c Exports 3.4.d Employment 3.4.e Key regions/areas where production is concentrated 3.5 production data 3.5.a Total production volumes and the value 3.5.b Total export volumes and the value
7 BADAN USAHA MILIK NEGARA 7.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 7.2 PT Pertamina (Persero) 7.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 7.4 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk 7.5 PT Timah (Persero) Tbk	3.6 State participation 3.6.a An explanation of the prevailing rules and practices regarding the financial relationship between the government and state owned enterprises (SOEs), 3.6.b Disclosures from SOE(s) on their quasi-fiscal expenditures 3.6.c Disclosures from the government and SOE(s) of their level of beneficial ownership in mining, oil and gas companies operating within the country's oil, gas and mining sector, including those held by SOE subsidiaries and joint ventures, and any changes in the level of ownership during the reporting period.

Matrix Daftar Isi dan Standar EITI

DAFTAR ISI	STANDAR EITI
8 REKOMENDASI	
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Daftar Penawaran Lelang Wilayah Kerja Dan Pemenang Lelang	
Lampiran 2: Rekapitulasi Persetujuan Pengalihan <i>Participating Interest</i> Wilayah Kerja Migas	
Lampiran 3: Ketentuan – Ketentuan Pokok dalam Kontrak yang Berlaku di Industri Ekstraktif	
Lampiran 4: Jumlah Kuantitas Ekspor Komoditas Mineral dan Batubara	
Lampiran 5: Daftar Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi BUMN	
Lampiran 6: Daftar Wilayah Kerja dan Wilayah Pertambangan yang dimiliki BUMN pada tahun 2012 – 2013	
Lampiran 7: Sumber Daya dan Cadangan Mineral Metalik Berdasarkan Komoditas	

DATA-DATA

YANG TIDAK TERSEDIA DI PUBLIK

Data yang Tidak Tersedia di Publik

Daftar atau Informasi Kadaster (*Cadastre information*)

Yaitu daftar informasi mengenai: pemilik lisensi; ii. koordinat dari wilayah pertambangan; iii. tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (date of award) dan durasi dari izin/kontrak; dan iv. jenis komoditas yang diproduksi (jika sudah memproduksi).

Observasi	Pendekatan Laporan
Publik dapat mengakses informasi kadaster pada media berikut ini: <u>Migas:</u> - Peta Wilayah Kerja migas terdapat di Lampiran Laporan Tahunan SKK Migas yang memuat informasi: Tipe kontrak (PSC/JOB), nama operator, tanggal efektif kontrak dan status operasi (eksplorasi atau produksi) - INAMETA PLATINUM yaitu sistem informasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang merupakan media untuk investor berisi database keteknisan termasuk informasi kadaster. Aplikasi ini sifatnya berbayar*.	<u>Migas:</u> - Keterangan berdasarkan observasi data yang tersedia di publik. - Lampiran 1.1 - 1.2 dalam Laporan EITI buku keempat memuat daftar wilayah kerja yang termasuk dalam ruang lingkup laporan EITI 2012-2013, komposisi kepemilikan dari kontraktor wilayah kerja tersebut, tanggal kontrak, tanggal kadaluarsa kontrak, komoditas yang diproduksi dan provinsi dari WK tersebut.

* US\$ 1,000/hari untuk satu blok tertentu, harga termasuk mahal karena memuat informasi teknis seperti laporan G&G, Seismic, log data dan lain-lain.

Data yang Tidak Tersedia di Publik

Daftar atau Informasi Kadaster (*Cadastre information*)

Observasi	Pendekatan Laporan
<u>Minerba:</u> Publik dapat mengakses informasi kadaster pada media berikut ini: Minerba: - Peta Wilayah Pertambangan per Kabupaten terdapat di Ditjen Minerba yang sifatnya berbayar - Akses MOMI belum diberikan kepada publik sesuai dengan Peraturan Dirjen Minerba No. 698K/30/DJB/2014¹	<u>Minerba:</u> - Keterangan berdasarkan observasi data yang tersedia di publik. - Lampiran 1.3 - 1.4 dalam Laporan EITI buku keempat memuat daftar perusahaan-perusahaan minerba yang termasuk dalam ruang lingkup laporan EITI 2012-2013 yang terdiri dari informasi mengenai nama perusahaan, jangka waktu izin/kontrak, nama komoditas yang diproduksi dan nama provinsi dari lokasi operasi perusahaan

¹ Akses MOMI belum diberikan kepada publik sesuai dengan Peraturan Dirjen Minerba No. 698K/30/DJB/2014. Hak akses MOMI hanya diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya serta instansi pemerintah lain, seperti KPK, Bea Cukai, Kementerian Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pajak

Data yang Tidak Tersedia di Publik

Daftar peserta tender

Proses tender hanya berlaku untuk tender wilayah kerja migas, tidak terdapat proses tender wilayah pertambnagn minerba pada tahun 2012-2013.

Observasi	Pendekatan Laporan
Pada prakterknya, Ditjen Migas tidak mengumumkan peserta tender kepada publik	Laporan EITI 2012-2013 melaporkan : 1) nama wilayah kerja yang ditenderkan pada tahun 2012-2013, 2) Lokasi wilayah kerja, 3) Nama pemenang tender dan menyampaikan jika peserta tender tidak dapat dipublikasikan oleh Ditjen Migas.

Pengungkapan kontrak-kontrak

Observasi	Pendekatan Laporan
- Tidak terdapat daftar kontrak yang dipublikasi oleh Pemerintah. - Terkait pengungkapan kontrak, terdapat kasus legal ²yang dapat menjadi catatan mengenai pengungkapan kontrak	- Membahas mengenai ketiadaan daftar kontrak yang dapat diakses oleh publik - Dan menuliskan kronologi kasus hukum permintaan pengungkapan kontrak dari keputusan adjudikasi KIP sampai dengan keputusan MA.

² Pada tahun 2011 Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik memohon salinan kontrak karya pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Timur Prima Coal, PT Newmont Mining Cooperation, dan PT Chevron Indonesia. Permohonan permintaan salinan kontrak PT Chevron ini dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), kecuali informasi mengenai informasi lokasi. Namun pada perkembangannya, PN Jakarta Selatan membatalkan keputusan adjudikasi KIP dan diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung.

Rapat Tim Pelaksana - 3 November 2015

Data yang Tidak Tersedia di Publik

Daftar pemilik manfaat (*beneficial owner*)

Observasi	Pendekatan Laporan
Bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek diwajibkan untuk mengungkapkan pemegang saham utama atau pengendali (<i>ultimate shareholders</i>) dalam laporan tahunannya berdasarkan peraturan Bapepam Kep-431/BL/2012. Publik dapat mengakses laporan tahunan perusahaan industri ekstraktif yang terdaftar di bursa di laman bursa efek Indonesia (http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangan/dantahunan.aspx)	Pembahasan mengenai peraturan terkait daftar pengungkapan pemilik manfaat di Indonesia. Minerba: Laporan EITI 2012-2013 mengungkapkan nama pemegang saham beserta komposisinya dari perusahaan yang mendapatkan konsesi (sistem kontrak atau perizinan) Migas: Laporan EITI 2012-2013 mengungkapkan nama operator dan non-operator beserta komposisi kepemilikannya (<i>participating interest</i>) dari wilayah kerja migas

DATA-DATA

YANG TIDAK DISEDIAKAN TIMLAK

Data yang Tidak Disediakan oleh Timlak

Data	Pendekatan Laporan
Kegiatan eksplorasi yang signifikan pada sektor pertambangan mineral dan batu bara pada tahun 2012 dan 2013	Memakai data yang diolah dari laman Badan Geologi yang memuat daftar data status tambang (termasuk yang berstatus eksplorasi rinci) berdasarkan komoditas dan lokasinya.
Total nilai penjualan berdasarkan komoditas untuk sektor minerba	Tim Kecil setuju untuk menggunakan harga referensi untuk menghitung nilai produksi ³

³ Harga referensi yang digunakan adalah harga referensi dari Ditjen Minerba (untuk logam) pada buku Indonesia Mineral and Coal Information 2014 dan harga rata-rata ekspor (untuk bijih) yang dilaporkan oleh BPS. Harga referensi yang kami dapatkan dari Ditjen Minerba sangat mendekati harga rata-rata dari London Metal Exchange.

Data yang Tidak Disediakan oleh Timlak

Data	Pendekatan Laporan
Total nilai ekspor (dalam unit uang – <i>monetary value</i>) berdasarkan perusahaan atau daerah untuk komoditas mineral dan batu bara pada tahun 2012 dan 2013	- Melaporkan volume dan Nilai ekspor nasional per komoditas dilaporkan dalam Laporan EITI 2012-2013 - Melaporkan volume ekspor berdasarkan perusahaan (untuk perusahaan dengan KK/PKP2B) dan berdasarkan daerah untuk IUP - Ditjen Minerba pada tahun 2012-2013 hanya memonitor volume produksi ekspor dan tidak memonitor nilai ekspor. Tim Kecil berkesimpulan bahwa nilai ekspor berdasarkan pelabuhan ekspor tidak relevan karena pada prakteknya pelaporan nilai ekspor dimonitor berdasarkan pelabuhan ekspor sedangkan lokasi perusahaan tidak selalu memiliki pelabuhan ekspor sehingga perusahaan melakukan ekspor di pelabuhan terdekat.

Data yang Tidak Disediakan oleh Timlak

Data	Catatan
Peta Wilayah Pertambangan dalam rangka pemenuhan TOR	Peta Wilayah Kerja. - Peta wilayah kerja migas dari Patranusa data berbentuk pdf Peta Wilayah Pertambangan Minerba - Peta wilayah pertambangan minerba dari Petromindo, namun tidak dapat dipublikasikan⁴. - Peta wilayah pertambangan minerba dari loket Ditjen Minerba dapat diprint seharga Rp 2jt per Kabupaten

⁴ Peta wilayah pertambangan berdasarkan pulau utama, batubara tersedia untuk Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Pertambangan Mineral tersedia untuk Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Papua dan Kepulauan Riau.

REKOMENDASI

Rekomendasi

1. Beberapa informasi tidak dapat diakses oleh publik

LATAR BELAKANG

Standar EITI mensyaratkan/mendorong beberapa informasi industri ekstraktif yang untuk dapat diakses oleh publik. Yaitu: informasi yang diharuskan adalah daftar informasi kadaster dan daftar peserta tender, informasi yang direkomendasikan adalah pengungkapan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*), dan keterbukaan informasi yang memuat ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan lisensi.⁴

OBSERVASI

Migas

- Informasi kadaster: tidak terdapat tanggal aplikasi dan koordinat
- Ditjen Migas tidak mempublikasikan informasi peserta tender

Minerba

- Tidak terdapat daftar informasi kadaster yang dapat diakses oleh publik
- Tidak terdapat daftar pemilik manfaat dari kepemilikan wilayah kerja migas yang dapat diakses oleh publik, dan
- Tidak terdapat daftar pengungkapan kontrak terkait kontrak bagi hasil migas yang dapat diakses oleh publik

⁴ EITI standar mendefinisikan bahwa ketentuan dalam kontrak adalah pengungkapan *full text* dari kontrak/lisensi, *full text* dari annex atau addendum dan *full text* dari amandemen.

Rekomendasi

1. Beberapa informasi tidak dapat diakses oleh publik

IMPLIKASI

Hilangnya beberapa materi yang dapat dijadikan dasar diskusi oleh masyarakat

REKOMENDASI

- Dengan mencatat adanya kasus hukum, kami merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia melakukan kajian hukum mengenai pengungkapan informasi koordinat dan kontrak terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Hasil dari kajian hukum tersebut bisa menjadi alasan yang kuat bagi Pemerintah Indonesia untuk mendorong instansi pemerintah terkait untuk mempublikasikan data yang harus dipublikasikan dan pada saat yang sama mempertahankan argumen Pemerintah Indonesia pada pihak EITI Internasional apabila Pemerintah tidak dapat mempublikasikannya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Kami merekomendasikan agar Pemerintah dapat mendorong Ditjen Migas untuk mengumumkan daftar peserta untuk memenuhi standard EITI.
- Untuk daftar pemilik manfaat, kami mengerti jika kemungkinan pemilik manfaat sulit didapatkan karena sering kali kepemilikan perusahaan sifatnya berjenjang dan kompleks. Namun sebagai langkah awal, kami merekomendasikan agar Tim Pelaksana dapat mendefinisikan “pemilik manfaat” sehingga dapat dimasukkan dalam format pelaporan di masa yang akan datang.

Rekomendasi

2. Peran aktif Tim Pelaksana

LATAR BELAKANG

Laporan kontekstual ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk masyarakat lebih bisa mengerti laporan rekonsiliasi dan menjadi dasar diskusi bagi masyarakat untuk perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, maka penting sekali untuk masyarakat mendapatkan penjelasan dan informasi dari pihak yang melaksanakan langsung tata kelola dan dari pelaku industri ekstraktif.

OBSERVASI

Dalam pelaksanaannya, seringkali kami menemui kesulitan dalam memperoleh data dan memperoleh konfirmasi dari beberapa instansi Tim Pelaksana antara lain dari Direktorat Jenderal Minerba dan Direktorat Jenderal Pajak mengenai sebagian konten dalam laporan kontekstual.

IMPLIKASI

Beberapa penjelasan dalam laporan kontekstual merupakan data dan penjelasan dari materi yang tersedia di publik yang mungkin saja masih memerlukan penjelasan yang lebih mendalam dari Tim Pelaksana.

REKOMENDASI

Kami menyarankan agar Tim Pelaksana bisa lebih terlibat dan berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi, memberikan penjelasan yang komprehensif dan mengkonfirmasi bagian-bagian yang terdapat di laporan kontekstual, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan penjelasan dari perspektif pelaksana tata kelola.

MATRIX

PEMENUHAN STANDAR EITI

Matrix daftar isi laporan rekonsiliasi

BAB	DAFTAR ISI	STANDAR EITI
1	Ruang Lingkup Rekonsiliasi 1.1 Skema Bagi Hasil Indonesia 1.2 Penerimaan Negara 1.2.1 Penerimaan negara yang di rekonsiliasi 1.2.2 Penerimaan negara yang tidak di rekonsiliasi 1.2.3 Penerimaan negara dari industri ekstraktif 1.2.4 Penyediaan Infrastruktur dan pengaturan barter 1.2.5 Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) 1.2.6 Transportasi 1.2.7 BUMN di industri ekstraktif 1.2.8 Pembayaran langsung perusahaan ke pemerintah daerah	4.1 defining the taxes and revenues to be covered in the EITI report 4.1. a, b,c Revenue stream to be reconciled included revenues collected in kind 4.1.d Infrastructure provision and barter arrangement 4.1.e Social expenditure where material social expenditures by companies are mandated by law or the contract with the government 4.1.f Transportation where revenues from the transportation of oil, gas and minerals constitute largeand SOE are expected to disclose 4.2.c SOE: Ensure the reporting comprehensively addresses the role of SOE 4.2.d Sub national payments: whether direct payment, within the scope of the agreed benefit streams, from companies to subnational government entities are material.

Matrix daftar isi laporan rekonsiliasi

BAB	DAFTAR ISI	STANDAR EITI
	1.3 Perusahaan yang di rekonsiliasi	4.2.a&b defining which companies and government entities are required to report
2	Metodologi	
3	Hasil Rekonsiliasi	
4	Dana Bagi Hasil	4.2.e Subnational transfer: where transfer between national and subnational government entities are related to revenues generated by the extractive industries and are mandated by a national constitution
5	Prosedur Audit	5.2.b Review audit and assurance practice
6	Temuan dan Rekomendasi	5.3.f The IA may wish to recommendation for strengthening the reporting process in the future Where previous EITI reports have recommended corrective action and reforms, the IA should comment on the progress

HASIL REKONSILIASI

SEKTOR MIGAS

Data Rekonsiliasi Final - Migas (2012)

Aliran Penerimaan	Satuan	KKKS	SKK Migas	Perbedaan	%
Government Lifting Minyak	Barel	179.733.566	179.733.566	-	-
Government Lifting Gas	Mscf	582.930.485	582.930.485	-	-
Domestic Market Obligation	Barel	25.688.134	25.712.827	24.693	0,10
Total Lifting Minyak	Ribuan USD	35.305.658	35.305.658	-	-
Total Lifting Gas	Ribuan USD	27.246.718	27.246.718	-	-
Domestic Market Obligation Fee	Ribuan USD	1.431.736	1.431.520	(216)	0,02
Over/Under Lifting Minyak	Ribuan USD	344.157	352.339	8.182	2,32
Over/Under Lifting Gas	Ribuan USD	130.069	130.384	315	0,24
			Ditjen Migas		
Total Lifting Minyak	Barel	314.302.234	314.305.913	3.679	0,001
Total Lifting Gas	Mscf	2.403.191.958	2.389.212.121	(13.979.837)	0,58
Signature Bonus	Ribuan USD	-	-	-	-
			Dit. PNPB		
Corporate & Dividend Tax	Ribuan USD	8.978.931	8.849.495	(129.436)	1,46
Production Bonus	Ribuan USD	3.750	3.750	-	-
		SKK Migas	Dit. PNPB		
Government Lifting Minyak - Ekspor & Domestik	Ribuan USD	20.219.167	20.242.558	23.391	0,12
Government Lifting Gas - Ekspor & Domestik	Ribuan USD	7.633.221	7.633.442	221	0,003

Data Rekonsiliasi Final - Migas (2013)

Aliran Penerimaan	Satuan	KKKS	SKK Migas	Perbedaan	%
Government Lifting Minyak	Barel	161.441.148	161.441.148	-	-
Government Lifting Gas	Mscf	599.343.313	599.343.313	-	-
Domestic Market Obligation	Barel	24.620.394	24.620.394	-	-
Total Lifting Minyak	Ribuan USD	31.333.441	31.333.441	-	-
Total Lifting Gas	Ribuan USD	26.246.329	26.246.329	-	-
Domestic Market Obligation Fee	Ribuan USD	1.224.647	1.224.647	-	-
Over/Under Lifting Minyak	Ribuan USD	381.198	381.216	18	0,005
Over/Under Lifting Gas	Ribuan USD	(4.143)	(3.990)	153	3,83
			Ditjen Migas		
Total Lifting Minyak	Barel	298.374.390	298.432.033	57.643	0,02
Total Lifting Gas	Mscf	2.406.327.046	2.357.703.962	(48.623.084)	2,06
Signature Bonus	Ribuan USD	200	200	-	-
			Dit. PNPB		
Corporate & Dividend Tax	Ribuan USD	8.048.312	8.034.236	(14.076)	0,17
Production Bonus	Ribuan USD	26.500	26.500	-	-
		SKK Migas	Dit. PNPB		
Government Lifting Minyak - Ekspor & Domestik	Ribuan USD	17.013.989	17.000.881	(13.108)	0,08
Government Lifting Gas - Ekspor & Domestik	Ribuan USD	7.423.089	7.423.089	-	-

Penyebab Perbedaan Akhir - Migas

Berdasarkan analisa, perbedaan akhir disebabkan antara lain oleh karena:

- Perbedaan perhitungan cost recovery, kewajiban DMO atau mekanisme perhitungan bagi hasil
- Perbedaan rate konversi untuk nilai satuan mscf dari mbtu
- Kesalahan setoran PPh Badan dan Dividen tidak ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi tetapi langsung ke rekening KUN pada BI
- Setoran atas produk hukum (STP, SKPKB) ke rekening KUN pada BI, bukan ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi
- Setoran koreksi atas kewajiban pajak tahun 2004-2007 oleh Dit. Hulu – PT Pertamina (Persero) yang diterima oleh Dit. PNBP – DJA yang tidak masuk cakupan entitas pelapor
- Penerimaan Negara yang dicatat untuk penjualan minyak bagian Negara termasuk premium
- Koreksi atas GOI lifting minyak dan gas bumi karena penyesuaian (koreksi) liting tahun sebelumnya di tahun berjalan
- Setoran atas TAC yang bukan merupakan entitas pelapor
- Sampai batas waktu yang ditentukan konfirmasi belum didapat dari entitas pelapor

HASIL REKONSILIASI

SEKTOR MINERBA

Data Rekonsiliasi Final - Minerba (2012&2013)

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Perusahaan Minerba	Instansi Pemerintah	Perbedaan Akhir	%
2012				
Royalti	12.265.887	12.080.759	(185.129)	1,53
PHT	8.450.232	8.404.626	(45.606)	0,54
PPh Badan	29.254.654	29.434.403	179.749	0,61
Dividen	1.904.971	1.904.971	-	-
Fee Transportasi	1.822.170	1.822.170	-	-
Total	53.697.914	53.646.929	(50.985)	0,1
2013				
Royalti	14.335.392	14.573.554	238.162	1,63
PHT	9.710.481	9.816.364	105.883	1,08
PPh Badan	17.719.327	18.090.063	370.736	2,05
Dividen	1.511.957	1.511.957	-	-
Fee Transportasi	1.812.104	1.812.104	-	-
Total	45.089.261	45.804.042	714.781	1,56

Penyebab Perbedaan Akhir - Minerba

Berdasarkan analisa, perbedaan akhir disebabkan antara lain oleh karena :

- *Timing difference* (perusahaan melaporkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya)
- Pembagian royalti dan PHT dalam laporan Ditjen Minerba berbeda dengan laporan perusahaan
- Ditjen Minerba salah melakukan alokasi/verifikasi setoran dari perusahaan
- Pembayaran pajak penghasilan ditujukan dalam satu grup perusahaan
- Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan

HASIL PENERIMAAN SATU SISI

SEKTOR MIGAS & MINERBA

Sektor Migas

Keterangan	2012	2013
Signature Bonus – Kontrak Baru (dalam ribuan USD)	28.700	15.500
Community Development / CSR (dalam ribuan USD):		
1. Hubungan Masyarakat	3.267	4.538
2. Pemberdayaan Masyarakat	1.680	1.553
3. Pelayanan Masyarakat	397	253
4. Infrastruktur	1.993	2.091
5. Lingkungan	252	385
Total CSR	7.589	8.820
Pajak Pertambahan Nilai (juta Rp)	6.963.798	9.385.488
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (juta Rp)	46.532	97.816
Pajak Bumi dan Bangunan (juta Rp)	14.394.500	15.438.789

Sektor Minerba

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Item Pelaporan	2012	2013
Iuran Tetap	68.873	80.454
Pajak Bumi dan Bangunan	359.790	380.692
PDRD	1.074.609	1.120.160
Pemb. Langsung ke Pemda	646.777	464.246
CSR:	136.409	109.782
1. Hubungan masyarakat	1.539.949	1.260.887
2. Pemberdayaan masy.	42.831	62.078
3. Pelayanan masyarakat	218.688	226.433
4. Infrastruktur	4.588	5.426
5. Lingkungan		
Penyediaan Infrastruktur	18.292	24.938
Iuran Penggunaan Hutan	350.179	368.963
DMO (ton)	44.398.363	53.448.032

Data Produksi dan Penjualan

Komoditas	Volume (jutaan ton)		Nilai Penjualan		Volume (jutaan ton)		Nilai Penjualan	
	Produksi	Penjualan	Rupiah (jutaan)	USD (ribuan)	Produksi	Penjualan	Rupiah (jutaan)	USD (ribuan)
Batubara	297	299	18.422.363	20.780.331	336	340	17.800.275	19.458.531
Mineral	615	579	1.331.087	6.710.776	977	855	1.685.092	7.491.457

COVERAGE

DATA YANG DIREKONSILIASI

Hasil Laporan Migas

- Entitas pemerintah

Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	7	1	6	14%
31 Agustus 2015	7	4	3	57%
5 Oktober 2015	7	7	-	100%

- Operator KKKS

Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	72	47	25	65%
31 Agustus 2015	72	72	-	100%

- Non operator KKKS

Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	100	32	76	32%
31 Agustus 2015	100	89	11	89%
5 Oktober 2015*	102	92	10	90%

(*) Sesuai keputusan rapat Tim Pelaksana tanggal 29 September 2015 karena penambahan partner

Hasil Laporan Minerba

- Entitas pemerintah

Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	7	-	7	0%
31 Agustus 2015	7	4	3	57%
5 Oktober 2015	7	7	-	100%

- Entitas perusahaan

Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	109	26	83	24%
31 Agustus 2015*	108	65	43	60%
5 Oktober 2015	108	87	21	81%

() Sesuai keputusan rapat Tim Pelaksana tanggal 21 Juli 2015 karena ada pengurangan perusahaan (bukan pemegang IUP)*

Coverage Rekonsiliasi

Sektor Migas

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Aliran Penerimaan	Total Penerimaan	Coverage	Percentage
2012			
GOI lifting oil		195.097.774	
GOI lifting gas		73.571.114	
Over (under) lifting		4.652.484	
C&D tax		85.291.433	
Bonuses		36.142	
Faktor Pengurang		(35.201.820)	
Total	346.141.307	323.447.128	93,44%
2013			
GOI lifting oil		177.574.202	
GOI lifting gas		77.534.164	
Over (under) lifting		3.940.126	
C&D tax		83.948.930	
Bonuses		278.882	
Faktor Pengurang		37.713.531	
Total	352.613.426	305.562.773	86,66%

Coverage Rekonsiliasi

Sektor Minerba

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Aliran Penerimaan	Total Penerimaan	Coverage	Percentage
2012			
Royalti	15.518.619.	12.080.759	78%
PHT	8.136.064	8.404.626	103%
PPh Badan	33.526.000	29.434.403	88%
Dividen	1.904.971	1.904.971	100%
Fee Transportasi	1.822.170	1.822.170	100%
Total	60.907.823	53.646.929	88%
2013			
Royalti	18.026.992	14.573.554	81%
PHT	9.789.588	9.816.364	100%
PPh Badan	19.695.000	18.090.063	92%
Dividen	1.511.957	1.511.957	100%
Fee Transportasi	1.812.104	1.812.104	100%
Total	50.835.641	45.804.042	90%

Perusahaan tidak lapor

Sektor Migas

Disajikan dalam Ribuan USD

Tidak Lapor (10 partner)	USD	Total Penerimaan oleh DJA	%
2012			
Revenue from tax	97.571	8.947.066	1,09%
Total Lapor			98,91%
2013			
Revenue from tax	29.568	8.063.804	0,37%
Total Lapor			99,63%

Sektor Minerba

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Tidak lapor (21 perusahaan)	Jumlah	Total Penerimaan 108 perusahaan	%
2012			
Revenue from Royalty & PHT	528.533	21.013.917	2,52%
Total Lapor			97,48%
2013			
Revenue from Royalty & PHT	759.678	25.149.591	3,02%
Total Lapor			96,98%

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Temuan dan Rekomendasi

No	Latar Belakang	Observasi	Implikasi	Rekomendasi
1	Pelaporan oleh Entitas Perusahaan			
	Penyampaian data laporan bersifat sukarela dan tidak ada sanksi yang mengikat bila entitas pelapor tidak menyampaikan laporannya	Entitas pelapor secara total untuk sektor migas dan minerba yang menyampaikan laporannya sebanyak 252 perusahaan dari 282 perusahaan atau secara persentase sebesar 89%	Hasil laporan tidak bisa maksimal karena tidak semua entitas pelapor menyampaikan laporannya	Pemerintah membuat payung hokum yang mengatur kewajiban pelaporan industry ekstraktif setiap tahunnya yang efektif, efisien dan terintegrasi untuk memenuhi berbagai kepentingan
2	Pembukaan Data Pajak			
	- Sesuai UU KUP pasal 34, pembukaan data pajak perusahaan harus dilampirkan dengan Letter of Authorization (LoA) - IA baru mendapatkan sebagian data pajak dalam waktu 2 bulan sejak LoA diberikan	- Perusahaan enggan memberikan LoA dan akta - Tidak ada sanksi - Rekonsiliasi sulit dilakukan karena data diberikan secara total tahunan - Sejak Juli 2015 kewenangan pencatatan admin pajak perusahaan migas dialihkan ke DJP	- Rekonsiliasi terkendala data pajak yang tidak didapat - Data tidak bisa direkonsiliasi - Banyak perusahaan tidak sempat klarifikasi angka	Agar dilakukan kajian oleh Ditjen Pajak yang menyatakan bahwa formulir pelaporan yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bermaterai dapat dipakai sebagai pengganti LoA untuk membuka data pajak

Temuan dan Rekomendasi

No	Latar Belakang	Observasi	Implikasi	Rekomendasi
3	Data dari Ditjen Minerba			
	Laporan dan data dari entitas pelapor Ditjen Minerba memerlukan waktu yang lama	- Data diberikan dalam bentuk soft file yang berisikan data Royalti dan PHT seluruh perusahaan minerba di Indonesia - Pemberian data melewati tenggat waktu yang ditentukan	IA mempunyai keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan sehingga analisa tidak maksimal	Mengingat Ditjen Minerba merupakan anggota Tim Pelaksana berdasarkan Perpres No.26 Tahun 2010, diharapkan untuk lebih aktif lagi berperan dalam proses pembuatan Laporan ini
4	Scoping Study			
	Perlu ditentukan batas materialitas perbedaan yang harus dilakukan penelusuran lebih lanjut	- Dalam Scoping Study belum ditentukan batas materialitas perbedaan yang tidak perlu direkonsiliasi - Diperlukan penentuan batas materialitas untuk memperlancar proses rekonsiliasi dan menentukan prioritas penelusuran perbedaan	IA harus melakukan penelusuran ke seluruh perbedaan-perbedaan yang timbul. Dengan keterbatasan waktu, dapat menyebabkan banyak perbedaan yang belum sempat ditelusuri	Untuk pembuatan Scoping Study mendatang perlu dicantumkan batas materialitas perbedaan yang harus ditelusuri, misalnya 5% sesuai dengan ketentuan pengungkapan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Temuan dan Rekomendasi

No	Latar Belakang	Observasi	Implikasi	Rekomendasi
5	Standar EITI Indonesia			
	Laporan EITI Indonesia mengacu pada standar EITI Internasional yang ditentukan	- Ada beberapa standar yang bertentangan dengan perundangan Indonesia seperti kerahasiaan data beneficial ownership, kadastral, koordinat, dll. - Perlu juga duperhatikan kedaulatan Negara - SAK yang mengacu kepada IFRS dapat dipakai sebagai acuan pembuatan standar EITI Indonesia - EITI Indonesia tidak bisa menerapkan keseluruhan Standar EITI Internasional	EITI Indonesia tidak dapat menerapkan keseluruhan Standar EITI Internasional secara menyeluruh (100%) disebabkan adanya perbedaan dalam bidang Law & Regulation antara Indonesia dengan negara-negara lainnya	Sekretariat EITI perlu menyusun standar EITI Indonesia (merupakan konfergensi dari Standar Internasional EITI) namun tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan meminta persetujuan EITI Internasional untuk mengesahkannya. Standar ini tidak merupakan 100% sama dengan Standar EITI Internasional
6	Satuan Gas dalam Format Pelaporan			
	Banyak terjadi kerancuan dalam pengisian volume gas	- Hasil gas bumi diukur dalam satuan mscf sedangkan saat penjualan menggunakan mbtu	Terdapat banyak perbedaan akibat konversi yang digunakan berbeda	- Untuk pelaporan mendatang disarankan digunakan satuan mbtu dan mscf

Temuan dan Rekomendasi

No	Latar Belakang	Observasi	Implikasi	Rekomendasi
		- Konversi gas bumi dari mbtu ke mscf berbeda-beda tergantung jenis komposisi gas yang dihasilkan - Entitas pelapor perusahaan menggunakan konversi rill sedangkan pemerintah menggunakan konversi rata-rata - Perbedaan konversi rate pada hasil LPG antara perusahaan dan pemerintah		- Dalam format pelaporan juga di minta memberikan data untuk konversi rate baik untuk mbtu ke mscf maupun dari ton ke mscf (untuk LPG)
7	Kesalahan Pencatatan Akun Pada Sektor Minerba			
	Alokasi Dana Bagi Hasil untuk sector minerba terdiri dari iuran produksi (royalti) dan iuran tetap	Masih terdapat kesalahan pencatatan royalti yang seharusnya Penjualan Hasil Tambang atau sebaliknya	Pemerintah Daerah tidak mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Pusat yang sebenarnya	- Pencatatan yang lebih akurat oleh Ditjen Minerba sehingga tidak merugikan Pemerintah Daerah



Terima kasih

Backup slide

Sektor Migas - Entitas Pelapor

Instansi Pemerintah :

- SKK Migas, Kementerian ESDM
- Ditjen Migas, Kementerian ESDM
- Dit PNB, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
- Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
- Propinsi Jawa Timur
- Propinsi Kalimantan Timur
- Propinsi Riau

Kontraktor Migas :

- *Operator* adalah pemegang *participating interest* yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang *participating interest* lainnya yang menjalankan kegiatan operasi Migas.
- *Non Operator* adalah pemegang *participating interest* yang tidak menjalankan kegiatan operasi Migas.
- *Participating Interest* adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.

Sektor Migas - Perusahaan belum lapor

- Entitas perusahaan

Nama Perusahaan	Blok	Nilai Pajak menurut Dit. PNB	
		(dalam ribuan US\$)	
		2012	2013
1. EMP ONWJ Ltd	Offshore North West Java (ONWJ)	25.461	24.524
2. Risco Energy / Salamander (acquired by Kupfec in 2013)	Offshore North West Java (ONWJ)	4.376	1.244
3. Hess (acquired by PHE in 2013)	Natuna Sea Block A	63.321	3.472
4. PT Imbang Tata Alam	Malacca Strait	0	0
5. PT Surya Kencana Perkasa	Tonga	0	0
6. PT Petross Petroleum Production	Tonga	0	0
7. Gulf Petroleum Investment Co.	Seram Non Bula	0	0
8. Lion International Investment Ltd	Setam Non Bula	0	0
9. Fuel X Tungkal	Tungkal	0	0
10. Orchard Energy Sumatra BV/Risco Energy (acquired by Kupfec in 2013)	South East Sumatra	4.413	328
TOTAL		97.571	29.568
TOTAL PENERIMAAN PAJAK		8.947.066	8.063.804
PERSENTASE		1.09%	0.37 %

Sektor Minerba - Sektor Minerba

Instansi Pemerintah :

- Ditjen Minerba, Kementerian ESDM
- Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan
- Dit PNBP, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
- Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
- Propinsi Jawa Timur
- Propinsi Kalimantan Timur
- Propinsi Riau

Perusahaan Minerba :

- Perusahaan Batubara pemegang kontrak PKP2B dan IUP-Batubara yang membayar royalty >25 M dan pembayar pajak yang meliputi 80% di tahun 2012 & 2013.
- Perusahaan Mineral pemegang kontrak KK-Mineral dan IUP-Mineral yang membayar royalty >25 M dan pembayar pajak yang meliputi 80% di tahun 2012 & 2013.

Perusahaan belum lapor (1/2)

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

No	Perusahaan	Kontrak	Provinsi	2012	2013
1	Riau Baraharum	PKP2B	Riau	33.869	-
2	Sumber Kurnia Buana	PKP2B	Kalimantan Selatan	89.646	-
3	Sebuku Iron Lateritic Ores	KK-MIN	Kalimantan Selatan	-	25.402
4	Bara Alam Utama	IUP-BB	Kalimantan Timur	39.258	40.648
5	Bhumi Rantau Energi	IUP-BB	Kalimantan Selatan	54.709	62.516
6	Energi Batubara Lestari	IUP-BB	Kalimantan Tengah	30.714	43.700
7	Gema Rahmi Persada	IUP-BB	Kalimantan Timur	38.864	-
8	Karya Gemilang Limpah Rejeki	IUP-BB	Kalimantan Tengah	30.777	-
9	Kayan Putra Utama Coal	IUP-BB	Kalimantan Timur	94.561	236.611
10	Padang Anugerah	IUP-BB	Kalimantan Timur	26.711	-
11	Tunas Muda Jaya	IUP-BB	Kalimantan Timur	-	30.560
12	KUD Gajah Mada	IUP-BB	Kalimantan Selatan	26.800	25.085
13	Bukit Merah Indah	IUP-MIN	Riau	-	29.625
14	Citra Silika Mallawa	IUP-MIN	Sulawesi Tenggara	-	31.091
15	Fajar Mentaya Abadi	IUP-MIN	Kalimantan Tengah	-	80.378
16	Gunung Sion	IUP-MIN	Kepulauan Riau	-	33.139
17	Serumpun Sebalai	IUP-MIN	Babel	-	26.016

Perusahaan belum lapor (2/2)

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

No	Perusahaan	Kontrak	Provinsi	2012	2013
18	Stargate Pasific Resources	IUP-MIN	Sulawesi Tenggara	-	29.617
19	Telaga Bintang Jaya	IUP-MIN	Kepulauan Riau	-	28.324
20	Tinindo Inter Nusa	IUP-MIN	Bangka Belitung	34.933	-
21	Tujuh SW	IUP-MIN	Bangka Belitung	27.692	36.969
TOTAL				528.533	759.678
TOTAL PENERIMAAN				21.013.917	25.149.591
PERSENTASE				2,52%	3,02%

Dari 21 perusahaan minerba yang tidak melapor dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. PT Fajar Mentaya Abadi sudah tutup berdasarkan surat dari Bupati Kotawaringin Timur No.188.45/476/HUK-DISTAMBEN/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Fajar Mentaya Abadi tanggal 2 Desember 2014
2. PT Tujuh SW sudah tutup berdasarkan akta Penegasan Pembubaran Perseroan Komanditer CV Tujuh SW oleh notaris Wahyu Dwi Cahyono, SH, M.kn terhitung sejak tanggal 6 September 2013
3. PT Bhumi Rantau Energi secara resmi melalui email menyatakan tidak mau melapor
4. Sisa 18 perusahaan sampai batas waktu yang ditentukan belum menyampaikan laporannya

Materiality Value Laporan

Sektor Migas

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan ribuan USD

Not Reported	Rupiah	USD	Central Government (LKPP) - Rupiah	%
2012				
Revenue from tax	940.389	97.571	83.460.740	1,13%
Total Reported				98,87%
2013				
Revenue from tax	256.153	24.524	88.747.436	0,29%
Total Reported				99,71%

Sektor Minerba

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Reported	Rupiah	E&Y Scoping	%
2012 - Revenue from Royalty, PHT, Tax			
Total Reported	48.741.234	86.751.683	56,18%
2013 - Revenue from Royalty, PHT, Tax			
Total Reported	40.504.082	124.388.580	32,56%

Materiality Value Laporan - Gabungan

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

		Rupiah	E&Y Scoping	%
2012	Scoping E&Y revenue		429.683.039	
	GOI lifting oil	194.871.282		
	GOI lifting gas	73.571.732		
	Over (under) lifting	4.220.456		
	C&D tax	79.913.650		
	Royalty	10.860.357		
	PHT	7.598.806		
	PPh Badan	28.762.306		
		399.798.589	429.683.039	93%
2013	Scoping E&Y revenue		475.880.825	
	GOI lifting oil	177.732.527		
	GOI lifting gas	77.534.168		
	Over (under) lifting	2.258.676		
	C&D tax	73.177.074		
	Royalty	13.259.083		
	PHT	9.289.387		
	PPh Badan	17.924.604		
		371.175.519	475.880.825	78%

Data Rekonsiliasi final 2012 (1/2)

- Royalti

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Akhir	
Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Royalti	1.105.504	1.095.687	(9.817)	1.109.030	1.086.664	(22.366)	2,05
PHT	845.526	833.295	(12.231)	847.758	843.758	(4.732)	0,56
Total USD	1.951.030	1.928.982	(22.048)	1.956.788	1.929.690	(27.098)	1,40
Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Royalti	1.569.692	1.617.009	47.317	1.577.061	1.607.493	30.432	1,89
PHT	279.539	270.023	(9.516)	279.539	279.539	-	-
Total Rupiah	1.849.231	1.887.032	37.801	1.856.600	1.887.032	30.432	1,61

- PPh Badan

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Pajak	Perbedaan Akhir	
Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
PPh Badan	2.451.647	2.432.099	(19.548)	2.453.582	2.442.127	(11.455)	0,46
Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
PPh Badan	5.475.049	5.881.782	406.733	5.607.030	5.897.183	290.153	4,92

Data Rekonsiliasi final 2012 (2/2)

- Royalti

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Akhir	
Bukit Asam	1.049.380	1.049.380	-	1.049.380	1.049.380	-	-
Aneka Tambang	564.137	564.137	-	564.137	564.137	-	-
Timah	291.454	291.454	-	291.454	291.454	-	-
Total	1.904.971	1.904.971	-	1.904.971	1.904.971	-	-

- Rekonsiliasi PT Bukit Asam Tbk dengan PT KAI

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Akhir	
Jasa Transportasi	1.878.599	1.718.063	(69.536)	1.822.170	1.822.170	-	-

Data Rekonsiliasi final 2013 (1/2)

- Royalti

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Akhir	
Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Royalti	1.197.457	1.240.127	42.670	1.213.481	1.235.638	22.157	1,79
PHT	843.337	848.664	5.327	847.557	857.682	10.125	1,18
Total USD	2.040.794	2.088.791	47.997	2.061.038	2.093.320	32.282	1,54
Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Royalti	1.676.309	1.709.644	33.335	1.660.580	1.667.313	6.733	0,40
PHT	860.600	815.644	(44.956)	857.743	857.873	130	0,01
Total Rupiah	2.536.909	2.525.288	(11.621)	2.518.323	2.525.186	6.863	0,27

- PPh Badan

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Pajak	Perbedaan Akhir	
Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
PPh Badan	1.282.352	1.249.321	(33.031)	1.276.966	1.307.342	30.376	2,32
Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
PPh Badan	4.387.820	3.614.275	(773.545)	4.381.419	4.434.872	53.453	1,20

Data Rekonsiliasi final 2013 (2/2)

- Royalti

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Akhir	
Bukit Asam	1.079.747	1.079.747	-	1.079.747	1.079.747	-	-
Aneka Tambang	291.948	291.948	-	291.948	291.948	-	-
Timah	140.262	140.262	-	140.262	140.262	-	-
Total	1.511.957	1.511.957	-	1.511.957	1.511.957	-	-

- Rekonsiliasi PT Bukit Asam Tbk dengan PT KAI

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Akhir	
Jasa Transportasi	1.818.587	1.864.863	46.276	1.812.104	1.812.104	-	-

Sektor Minerba (1/2)

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Item Pelaporan	2012			2013		
	Rupiah	USD	Ton	Rupiah	USD	Ton
Iuran Tetap	20.307	5.039	-	21.116	5.681	-
Pajak Bumi dan Bangunan	359.790	-	-	380.692	-	-
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	608.766	48.334	-	634.676	46.480	-
Pembayaran Langsung ke Pemda	600.486	4.803	-	413.797	4.830	-
CSR:	101.134	3.660	-	76.797	3.158	-
1. Hubungan masyarakat	240.448	134.831		162.815	105.129	
2. Pemberdayaan masyarakat	12.182	3.180		11.169	4.874	
3. Pelayanan masyarakat	83.014	14.077		126.182	9.598	
4. Infrastruktur	2.728	193		3.504	184	
5. Lingkungan						
Penyediaan Infrastruktur	3.584	1.526	-	3.411	2.061	-
Iuran Penggunaan Kawasan Hutan	350.150	3	-	368.963	-	-
DMO	-	-	44.398.363	-	-	53.448.032
Batubara						
Mineral						

Sektor Minerba (2/2)

- Data Produksi dan Penjualan

Komoditas	Volume (jutaan ton)		Nilai Penjualan	
	Produksi	Penjualan	Rupiah (jutaam)	USD (ribuan)
2012				
Batubara	297	299	18.422.363	20.780.331
Mineral	615	579	1.331.087	6.710.776
TOTAL	912	878	19.753.451	27.491.107
2013				
Batubara	336	340	17.800.275	19.458.531
Mineral	977	855	1.685.092	7.491.457
TOTAL	1.313	1.195	19.485.367	26.949.988

Data Rekonsiliasi 2012 (1/3)

Aliran Penerimaan	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	%
Government lifting Minyak (Barel)	177.959.211	179.727.474	1.768.263	179.733.566	179.733.566	-	-
Government lifting Gas (MSCF)	542.980.072	593.216.099	50.236.027	582.930.485	582.930.485	-	-
Domestic Market Obligation (Barel)	25.636.734	25.712.562	75.828	25.688.134	25.712.827	24.693	0,10
Aliran Penerimaan	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Akhir	%
Total Lifting oil (Barel)	314.300.404	314.305.913	5.509	314.302.234	314.305.913	3.679	0,001
Total Lifting gas (MSCF)	2.002.831.970	2.389.212.121	386.380.151	2.403.191.958	2.389.212.121	(13.979.837)	0,58

Secara umum perbedaan akhir di atas disebabkan oleh:

- Terdapat *dispute* perhitungan antara KKKS dan SKK Migas dan dikoreksi
- Perbedaan data lifting migas berdasarkan Laporan A0
- *Net off*
- Perbedaan penggunaan konversi rate

Data Rekonsiliasi 2012 (2/3)

Disajikan dalam Ribuan USD

Aliran Penerimaan	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	%
Total lifting Minyak	33.914.331	35.305.658	1.391.327	35.305.658	35.305.658	-	-
Total lifting Gas	26.033.509	26.942.080	908.571	27.246.718	27.246.718	-	-
DMO Fee	1.435.098	1.430.886	(4.212)	1.431.736	1.431.520	(216)	0,02
Over/(under) Lift Minyak	373.740	273.350	(100.390)	344.157	352.339	8.182	2,32
Over/(under) lift Gas	130.827	164.546	33.719	130.069	130.384	315	0,24

Secara umum perbedaan akhir di atas disebabkan oleh:

- Perbedaan perhitungan kewajiban DMO
- Perbedaan karena *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil
- Perbedaan mekanisme perhitungan bagi hasil

Data Rekonsiliasi 2012 (3/3)

Disajikan dalam Ribuan USD

Aliran Penerimaan	KKKS	Dit. PNPB	Perbedaan Awal	KKKS	Dit. PNPB	Perbedaan Akhir	%
C & D Tax	9.338.684	8.184.208	(1.154.476)	8.978.931	8.849.495	(129.436)	1,46
Production Bonus	3.000	3.750	750	3.750	3.750	-	-
Aliran Penerimaan	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Akhir	%
Signature Bonus	-	-	-	-	-	-	-
Aliran Penerimaan	SKK Migas	Dit. PNPB	Perbedaan Awal	SKK Migas	Dit. PNPB	Perbedaan Akhir	%
Govern. Lifting Minyak	20.219.059	20.242.558	23.499	20.219.167	20.242.558	23.391	0,12
Govern. Lifting Gas	7.633.519	7.633.442	(77)	7.633.221	7.633.442	221	0,003

Secara umum perbedaan akhir di atas disebabkan oleh:

- Kesalahan penggunaan rekening tujuan oleh KKKS
- Pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, dll.) yang disetor ke rekening DJP
- Setoran untuk TAC Poleng
- *Net off*
- Belum ada konfirmasi dari KKKS sampai dengan batas waktu
- Penerimaan negara termasuk Premium

Data Rekonsiliasi 2013 (1/3)

Aliran Penerimaan	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Post-Rekon	%
Government lifting Minyak (Barel)	160.918.253	161.438.451	520.198	161.441.148	161.441.148	-	-
Government lifting Gas (MSCF)	1.067.871.458	610.286.225	(457.585.233)	599.343.313	599.343.313	-	-
Domestic Market Obligation (Barel)	24.432.588	24.519.779	87.191	24.620.394	24.620.394	-	-
Aliran Penerimaan	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Post-Rekon	%
Total Lifting Minyak (Barel)	298.307.633	298.432.033	124.400	298.374.390	298.432.033	57.643	0,02
Total Lifting Gas (MSCF)	8.575.063.700	2.357.703.962	(6.217.359.738)	2.406.327.046	2.357.703.962	(48.623.084)	2,06

Secara umum perbedaan akhir di atas disebabkan oleh:

- Perbedaan data lifting gas karena perbedaan pemakaian konversi rate
- Perbedaan data lifting migas berdasarkan Laporan A0
- Data dari ESDM yang termasuk *lifting* dari *production test*.
- *Net off*
- Perbedaan pelaporan antara dokumen A0 dan FQR

Data Rekonsiliasi 2013 (2/3)

Disajikan dalam Ribuan USD

Aliran Penerimaan	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	%
Total Lifting Minyak	29.966.150	31.333.441	1.367.291	31.333.441	31.333.441	-	
Total Lifting Gas	24.878.217	26.246.330	1.368.113	26.246.329	26.246.329	-	
DMO Fee	1.217.798	1.224.647	6.849	1.224.647	1.224.647	-	
Over/(under) lift Minyak	381.612	220.235	(161.377)	381.198	381.216	18	0,005
Over/(under) lift Gas	(2.345)	(3.991)	(1.646)	(4.143)	(3.990)	153	3,83

Secara umum perbedaan akhir di atas disebabkan oleh:

- Perbedaan *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil
- Perbedaan mekanisme *settlement over/under lifting* dengan KKKS Medco

Data Rekonsiliasi 2013 (3/3)

Disajikan dalam Ribuan USD

Aliran Penerimaan	KKKS	Dit. PNB	Perbedaan Awal	KKKS	Dit. PNB	Perbedaan Akhir	%
C & D Tax	8.418.919	7.581.550	(837.369)	8.048.312	8.034.236	(14.076)	0,17
Production Bonus	26.500	26.500	-	26.500	26.500	-	-
Aliran Penerimaan	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Akhir	%
Signature Bonus	200	-	(200)	200	200	-	-
Aliran Penerimaan	SKK Migas	Dit. PNB	Perbedaan Awal	SKK Migas	Dit. PNB	Perbedaan Akhir	%
Govern. Lifting Minyak		20.242.558	23.499	20.219.167	20.242.558	23.391	0,12
Govern. Lifting Gas	7.633.519	7.633.442	(77)	7.633.221	7.633.442	221	0,003